

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.539139/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
- 3. Provinsi : (25) PAPUA
- 4. Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
- Sebesar : Rp. 87.730.000 (DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 87.730.000
Rp. 87.730.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 87.730.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 87.730.000

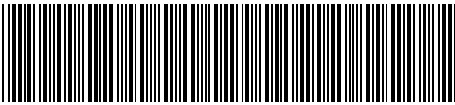
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8903-5064-8425-3408

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			87.730.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			87.730.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	-			
		2. 03	-			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	12.000.000
Rincian Output	:	01 AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	12.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	405.000
Rincian Output	:	01 BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,00	Perkara	405.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang	33.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	42.325.000
Rincian Output	:	01 QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1,00	Perkara	42.325.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
I B. SUMBER DANA



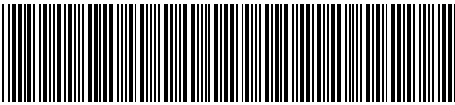
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	87.730.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	87.730.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

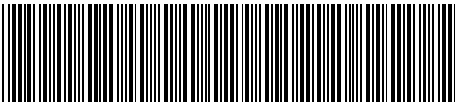


DS:8903-5064-8425-3408

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	-	87.730	-	-	-	87.730		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	87.730	-	-	-	87.730		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	87.730	-	-	-	87.730		
1059.AEA	Koordinasi (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	12.000	-	-	-	12.000	25 . 51	
01	RM	-	12.000	-	-	-	12.000	063@	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	405	-	-	-	405	25 . 51	
01	RM	-	405	-	-	-	405	063	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	33.000	-	-	-	33.000	25 . 51	
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000	063@	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	42.325	-	-	-	42.325	25 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8903-5064-8425-3408

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

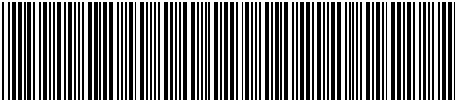
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	42.325	-	-	-	42.325	063@	
JUMLAH		-	87.730	-	-	-	87.730		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8903-5064-8425-3408

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

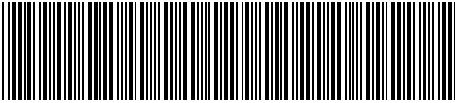
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	500	3.150	3.150	3.150	3.150	4.783	3.555	6.222	3.150	4.783	52.137	87.730
		BELANJA BARANG	0	500	3.150	3.150	3.150	3.150	4.783	3.555	6.222	3.150	4.783	52.137	87.730
		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	500	3.150	3.150	3.150	3.150	4.783	3.555	6.222	3.150	4.783	52.137	87.730
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	500	3.150	3.150	3.150	3.150	4.783	3.555	6.222	3.150	4.783	52.137	87.730
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.745	20.819
		- PNBP (425232)	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137	1.600
		- PNBP (425233)	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	278	3.270
005.05.BF.1059	- PNBP (425239)	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.330	15.949	

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
IV A. B L O K I R



DS:8903-5064-8425-3408

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539139] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

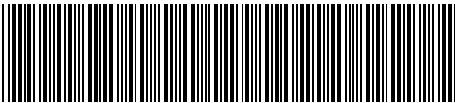
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 47.759 52 Belanja Barang Rp. 47.759		
005.05.BF 1059	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		
1059.AEA	Koordinasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.500 Efisiensi Anggaran Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 934 Efisiensi Anggaran Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100 Efisiensi Anggaran Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.225 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8903-5064-8425-3408

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539139] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775